

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Tinjauan Pustaka

Pembangunan masyarakat dan pemberdayaan rakyat tidak mungkin dipisahkan dari arena dan konteks dimana ia beroperasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari strategi dan program pembangunan kesejahteraan social (Suharto, 2005).

1.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa literatur yang relevan untuk mendukung penelitian. Beberapa referensi yang relevan. Pembahasan mengenai Implementasi CSR PT. PLN (Persero) Unit Induk Banten Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PLN Peduli Di Serang, Banten, penulis hanya menemukan yang hamper sama dengan judul penelitian yang peneliti lakukan sesuai sumber yang ada di Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Kesejahteraan Sosial yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan
1.	Deni Sopiandah Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta	Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Mandiri Sebagai Upaya Pemberdayaan	Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana pelaksanaan program-program CSR pada PT. Bank Mandiri dalam memberdayakan masyarakat. Untuk metode penelitian ialah kualitatif deskriptif

		Masyarakat	dengan teori yang digunakan adalah Teori CSR dan Teori Pemberdayaan.
2.	Fitta Fauziah Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Corporate Social Responsibility PT. Bank BNI Syariah: Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Yayasan Nara Kreatif	Penelitian ini bertujuan mengetahui program Duta Hasanah CSR PT. Bank BNI Syariah apakah memberikan dampak pemberdayaan kepada anak jalanan. Metode yang dipilih kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah Teori CSR
3.	Rizal Hamdan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta	Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PT. PTP) Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kali	Penelitian ini bertujuan mengetahui manfaat CSR pada PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PT. PTP) dalam pemberdayaan program kali bersih. Metode yang dipilih kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah Teori CSR, Teori Manfaat, dan

		Bersih (PROKASIH)	Teori Pemberdayaan.
--	--	----------------------	---------------------

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ambar Teguh S (2018) mengungkapkan arti pemberdayaan sebagai berikut, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga, upaya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Selain itu pemberdayaan juga berasal dari bahasa inggris ‘empower’ yang menurut Marriam Webster dan Oxford english dictionary mengandung dua pengertian yaaitu *to give power or authority tol* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain sedangkan pengertian yang ke dua yaitu *to give ability to or enable* atau upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Pemberdayaan adalah sebuah ‘proses menjadi’ bukan sebuah ‘proses instansi’. Sebagai proses pemberdayaan mempunyai 3 tahap yaitu kesadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.¹¹ Pemberdayaan pada akhirnya bukanlah sekedar teori sebagaimana dikatakan Ron Johnson dan David Redmod (*the art of empowerment, 1992*) bahwa *at last, empowerment is about art. It is about value we believe*. Tatkala pemberdayaan menjadi salah satu praktek dan seni, yang mengemukakan adalah bagaimna memejemeni proses pemberdayaan, artinya pemberdayaan tidak boleh bermakna ‘merobotkan’ atau ‘menyeragamkan’. Pemberdayaan juga memberikan ruang pada

pengembangan keberagaman kemampuan manusia yang beragam, dengan asumsi satu sama lain akan melengkapi. Pemberdayaan merupakan proses alamiah.

Pemberdayaan merupakan konsep kehidupan proses alamiah, kehidupan itu perlu dan harus di manajemi. Konsep manajemi berbeda dengan rekayasa karena manajemen lebih fokus pada meningkatkan nilai tambah suatu aset. Jadi pemberdayaan bukanlah semata mata konsep politik melaikan pada konsep suatu manajemen dan pada akhirnya pemberdayaan akan mempunyai indikator akan keberhasilan.

Community dalam bahasa Yunani adalah ‘persahabatan’. Sebagai refleksi dari kata tersebut, Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia yang hidup bersama dalam masyarakat karena mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dan untuk menentukan makna kehidupan. Masyarakat dalam konteks pemberdayaan adalah masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah tertentu yang memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Sehingga tercipta kerjasama antar masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkup kehidupan bersama untuk melakukan pembangunan dalam yang terarah. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas (Talizi, 1990).

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan.

Menurut (Kartasmita, 2005) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang

dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut adalah dengan jalan pemberdayaan masyarakat. hal tersebut juga disebutkan oleh Widayanti mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi *concern* publik dan dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai dalam mengatasi masalah sosial, terutama kemiskinan, yang dilaksanakan berbagai elemen mulai dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Sipil. Aksi pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberikan daya atau kekuatan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Aksi pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan untuk memandirikan masyarakat agar dapat menghadapi berbagai tantangan di kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan *skill* masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

2.2.1.1 Tahapan Pemberdayaan

Menurut Endah K (2020) proses pemberdayaan mempunyai 3 tahapan penyadaran, pengkapasitasan dan pendayan secara sederhana digambarkan sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah penyadaran, pada tahap ini target yang hendak diperdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu, misalnya target adalah kelompok masyarakat miskin.

Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program program yang dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat *kognisi*, *belief* dan *healing*. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka mampu membangun mimpi, diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari luar diri mereka).

2. Tahap kedua adalah pengkapasitasan inilah yang sering kita sebut ‘‘*capacity bulding*’’ atau yang dalam bahasa yang sederhana memampukan atau *enabling*. untuk diberikan daya atau kuasa yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah seharusnya daerah daerah yang hendakn diotonomikan diirikan program kemampuan untuk membuat mereka cakap dalam mengelola otonomi yang diberikan. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturasi mampu melaksanakan otoni daerah dengan baik dan benar karena masalah tidak memadainya kecakapan daerah dalam melakukan otonomi daerah. Biaya otonomi daerah biasanya sangat mahal karena pengkapasitasan pasca pemberian otonomi bertemu dengan resistensi dan ketegangan yang seharusnya tidak terjadi. Peranan pemerintah di Desa wisata Penglipuran dalam hal ini adalah meningkatkan sumber daya manusia melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan di bidang kepariwisataan maupun kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha kerajinan di area obyek wisata.
3. Tahap ketiga adalah cukup sederhana namun, namun kita tidak cakap dalam menjalankannya karna mengabaikan bahwa dalam kesederhanaan pun ada ukuran. Pokok gagasannya adalah bahwa proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuatu dengan kecakapan penerima. Pemberian kredit pada suatu klompok

miskin yang sudah melalui proses penyadaran dan pengkapsitasan masih perlu disesuaikan dengan kemampuan pengelolaan usaha. Jika perputaran usahanya mampu mencapai 5 juta tidaklah diberikan pinjaman modal sebesar 50 juta.

Tim Delivery (2004) menawarkan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat (Soebianto, 2015). Secara jelas masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seleksi Lokasi/Wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang di harapkan.

2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut (Safira, 2018).

- a) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri

- dalam mengidentifikasi serta menganalisis keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya.
- b) Pengembangan kelompok. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian yang mendalam dan menganalisa masalah-masalah yang ada.
 - c) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan. Menerapkan rencana kegiatan kelompok seperti rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping, selanjutnya di implementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal.
 - d) Monitoring dan evaluasi. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (*Participatory Monitoring & Evaluation*). Monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya.

4. Pemandirian Masyarakat

Berpegang dalam prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya (Safira, 2018).

Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, meskipun faktor-faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud *self organizing* dari masyarakat, namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga di dampingi oleh suatu tim fasilitator

yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu *external factor* dalam pemberdayaan masyarakat.

Peran tim pada awal proses sangat aktif, tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatan secara mandiri.

Selaras dengan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan yang telah di kemukakan tersebut (Safira, 2018).

- a) *Penetapan dan pengenalan wilayah kerja*, Sebelum melakukan kegiatan, penempatan wilayah kerja perlu memperoleh kesepakatan antara tim fasilitator, aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan yang lain (pelaku bisnis, tokoh masyarakat, aktivis LSM, akademisi dll). Hal ini tidak saja untuk menghindari gesekan atau konflik kepentingan antar semua pemangku kepentingan, tetapi juga untuk membangun sinergi dan memperoleh dukungan berupa partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, demi keberhasilan program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan.
- b) *Sosialisasi kegiatan*, yaitu upaya untuk mengkomunikasikan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Termasuk dalam sosialisasi kegiatan, perlu juga dikemukakan tentang pihak-pihak terkait yang akan diminta partisipasi/keterlibatannya.
- c) *Penyadaran masyarakat*. Dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya, baik sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi dan politik.

5. Pendampingan Masyarakat

Membangun dan memberdayakan masyarakat yang melibatkan proses dan tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya (Suharto, 2010).

Pendampingan sosial kemudian hadir sebagai agen perubah (*change agent*) yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Dengan demikian, pendampingan masyarakat dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok masyarakat dan pendamping untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti:

- a. Merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi.
- b. Memobilisasi sumberdaya setempat.
- c. Memecahkan masalah social.
- d. Menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan.
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

Pendampingan sosial memiliki peranan yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pemberdayaan, seorang pendamping masyarakat sangat perlu memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Dalam konteks ini, peran seorang pekerja sosial atau pendamping masyarakat seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (*problem solve*) secara langsung. Mereka biasanya terlibat dalam penguatan partisipasi rakyat dalam proses perencanaan, implementasi maupun monitoring serta evaluasi program kegiatannya (Suharto, 2010)

Ada beberapa peran pendamping dalam pendampingan masyarakat. Empat peran di bawah ini sangat relevan menurut (Suharto, 2020)

1. Tahapan Persiapan (*Engagement*)

Pada tahapan persiapan ini didalamnya sekurang-sekurangnya ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu (a) persiapan petugas; dan (b) persiapan lapangan, persiapan petugas dalam hal ini tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa juga dilakukan oleh *community worker*, dan persiapan lapangan merupakan prasyarat suksesnya suatu program intervensi komunitas di tingkat lokal, yang pada dasarnya di usahakan dilakukan secara non-direktif.

2. Tahap Pengkajian (*Assessment*)

Proses assessment yang dilakukan di sini dapat dilakukan secara individual melalui tokoh-tokoh masyarakat (*key-person*), tetap dapat juga melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan (*Designing*)

Pada tahap ini, *community worker* secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan.

4. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi (*Designing*)

Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana.

5. Tahap Pelaksanaan Program (*Implementation*)

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam program pemberdayaan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara petugas dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar warga.

6. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pengembangan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan membentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal.

7. Tahap Terminasi (*Disassessment*)

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dalam suatu program pemberdayaan masyarakat, tidak jarang dilakukan bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi lebih karena proyek sudah harus diberhentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyanggah dana yang dapat dan mau meneruskan.

2.2.1.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil) (Suharto, 2009).

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri (Sulistiyani, 2004).

Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses, melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan tercapainya kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Sulistiyani, 2004).

Menurut Mardikanto (2015), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Perbaikan Kelembagaan "*Better Institution*" Dengan perbaikan kegiatan/Tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga Lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya.
2. Perbaikan Usaha "*Better Business*" Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari Lembaga tersebut. Di samping itu, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota Lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya.
3. Perbaikan Pendapatan "*Better Income*" Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan atau *income* dari seluruh anggota Lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya

- perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. Perbaikan Lingkungan “*Better Environment*” Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal bila kualitas manusia tinggi, yang salah satu faktornya adalah memiliki Pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak lingkungan.
 5. Perbaikan Kehidupan “*Better Living*” Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Diantaranya tingkat Kesehatan, tingkat Pendidikan, dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
 6. Perbaikan Masyarakat “*Better Community*” Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan “fisik dan social” yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula (Maryani & Roselin, 2012).

2.2.1.3 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat merupakan usaha yang dijalankan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar semakin mampu memenuhi kebutuhannya dan semakin dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara sejajar dengan yang lain.

(Maspaitella,2014) L.M Parsons menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*):

1. **Mikro.** Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
2. **Mezzo.** Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. **Makro.** Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Startegi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Menurut (Darmayanti, 2015), Strategi dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1. **Pembentukan kelompok**
Pembentukan kelompok merupakan fase awal dari pemberdayaan. Artinya masyarakat miskin atau masyarakat lemah diberi kebebasan untuk membentuk dan beraktivitas dalam kelompok yang diinginkannya. Pembentukan kelompok menyediakan suatu dasar bagi terciptanya kohesi sosial anggota kelompok.
2. **Pendampingan**
Fungsi pendampingan sangat krusial dalam membina aktivitas kelompok. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung), ataupun dinamisator (penggerak), melalui pendampingan, kelompok diharapkan tidak bergantung pada pihak luar namun dapat dibentuk untuk tumbuh dan berfungsi sebagai suatu kelompok kegiatan yang mandiri.
3. **Perencanaan kegiatan**
Tahap perencanaan kegiatan melengkapi tahap-tahap sebelumnya yang mementingkan peran aktif anggota kelompok untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui kemampuannya. Prinsip-prinsip penting dalam tahap perencanaan kegiatan ini adalah:
 - a. **Prinsip keterpaduan**
Dalam prinsip ini berarti suatu kegiatan pemberdayaan harus terkait dengan kegiatan-kegiatan lain dalam lingkup daerah tersebut.
 - b. **Prinsip kepercayaan**
Di dalam prinsip ini merupakan sebuah hakikat yang harus ada di dalam setiap partisipasi dan pemberdayaan itu sendiri.
 - c. **Prinsip kebersamaan dan kegotongroyongan**

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan harus mampu menumbuhkan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, kesetiakawanan dan kemitraan antar anggota kelompok.

d. Prinsip kemandirian

Prinsip ini menekankan bahwa kegiatan atau program harus dapat menumbuhkan rasa percaya diri bahwa masyarakat miskin mampu menolong dirinya sendiri dan bermanfaat dalam meningkatkan taraf hidup anggota kelompok serta harus dapat berkembang secara berkesinambungan.

2.2.1.4 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Terdapat empat prinsip pemberdayaan masyarakat menurut (Sri Najati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, 2018) yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Dinamika yang dibangun adalah kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar.

2. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan 8 pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendalakendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan.

2.2.1.5 Pemberdayaan Komunitas

Lilik Tahmidaten (2016:3), menyatakan pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan komunitas berasal dari kata “*empowerment*”, penggunaan istilah ini sering digunakan bersama istilah “pengentasan kemiskinan”. Pemberdayaan komunitas dapat diartikan dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan individu, kelompok, dan masyarakat. Kebutuhan ini berhubungan dengan adanya kemampuan pemilihan dan pengontrolan lingkungan untuk memenuhi keinginan-keinginan, aksesibilitas terhadap sumber daya, terkait dengan pekerjaan, dan aktivitas sosial lainnya.

Suntari (2017:11), secara konseptual menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat (komunitas) merupakan usaha meningkatkan harkat dan martabat, dimana masyarakat kesulitan untuk lepas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Secara sederhana, dapat diartikan sebagai peningkatan segala potensi yang dimiliki masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui kegiatan swadaya.

Ragam Pendekatan pemberdayaan komunitas dan contohnya Namun sebelum pada pemberdayaan ini, perlu diketahui beberapa pendekatan yang seharusnya dilakukan. Pendekatan tersebut merupakan cara untuk menentukan dan melatarbelakangi strategi, serta metode pemberdayaan yang akan dilakukan. Oleh Lilik Tahmidaten dan Sri Suntari (2017:59-60), ada tiga metode pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan komunitas atau masyarakat, antara lain sebagai berikut;

- 1) Pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) Pendekatan ini berfokus pada pemberian bantuan untuk menghadapi bencana alam di masyarakat. Contohnya adalah memberikan bantuan kepada korban bencana alam.
- 2) Pendekatan pembangunan (*the development approach*) Pendekatan ini berfokus pada perhatian pembangunan dalam meningkatkan kemandirian, kemampuan, dan swadaya masyarakat. Contohnya adalah pemberian dana bantuan pembangunan untuk menumbuhkan swadaya masyarakat.
- 3) Pendekatan pemberdayaan (*the empowerment approach*) Pendekatan ini berfokus kepada upaya untuk mengentas kemiskinan akibat proses politik. Dimaksudkan untuk memberdayakan dan melatih rakyat dalam mengatasi ketidakmampuan. Kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan, contoh dari pendekatan ini yaitu pemberian modal kecil. Cara Pendekatan Pemberdayaan Komunitas Selain metode, ada cara-cara atau strategi dalam pendekatan meningkatkan keterlibatan anggota komunitas. Setiyo Yuli Handoko dkk dalam buku Pemberdayaan Masyarakat Pertanian oleh Setiyo Yuli Handoko (2020:63-64) menjelaskan, ada tiga pendekatan pemberdayaan yang bisa dipilih dalam rangka meningkatkan keikutsertaan masyarakat antara lain:
 1. Pendekatan "fungsi tunggal" Pendekatan ini dilakukan oleh fasilitator dari luar masyarakat. Namun, pendekatan ini tidak mendapatkan respons dari masyarakat karena terjadi kendala dalam pengadopsiannya. Pendekatan fungsi tunggal memiliki kekurangan, karena masyarakat cenderung tergantung pada pihak eksternal.
 2. Pendekatan "multiple" Pendekatan ini dilakukan oleh fasilitator berupa tim ahli dari eksternal masyarakat yang memberi pelayanan. Kencenderungan dari pendekatan ini adalah masyarakat justru bergantung kepada tim ahli.

3. Pendekatan "pendekatan sumber daya dalam". Pendekatan ini dilakukan berdasarkan sumber daya alam dari kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan dengan pendekatan ini merupakan yang paling efektif. Setiap masyarakat tentu memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga, pendekatan yang digunakan juga harus sesuai dengan masyarakat tersebut. Dikutip dari modul Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat oleh Ristekdikti (2020:11-12), terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain:
 - a. *Collaborative* Pendekatan ini mengacu pada hubungan pemberi kegiatan dengan masyarakat yang diberdayakan. Kegiatan ini mendengarkan dan merespon ide-ide apa yang dilakukan dan cara untuk melakukannya dalam masyarakat.
 - b. *Participatory* Pendekatan ini mengacu pada mengajak masyarakat untuk andil dalam kegiatan pemberdayaan. Sedangkan, pendekatan ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kekuatan yang ada dalam masyarakat.
 - c. *Inclusive* Pendekatan Inclusive mengacu pada pelibatan masyarakat dalam segala proses pemberdayaan. Pada pendekatan ini, masyarakat setara dengan mitra atau rekan kerja. Sehingga, masyarakat harus dilibatkan dalam semua kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi.
 - d. *Quality Assurance-Oriented* Pendekatan ini mengacu pada pemberian pengawasan kualitas, keamanan, aksesibilitas, dan tingkatan penerimaan pelayanan. Meliputi juga program, kesepakatan masyarakat, kepaduan dan keterkaitan masyarakat dalam memberikan pelayanan sepenuhnya.

- e. *Bottom-Up* Pendekatan ini mengacu pada pembangunan hubungan dari bawah ke atas. Dimulai dari hubungan komunitas antar masyarakat, penerima dengan pemberi kegiatan pemberdayaan, antar institusi, dan sistem-sistem di atasnya.

2.2.1.6 Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi merupakan hal yang erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dinilai berhasil atau tidaknya terlihat dari bagaimana partisipasi masyarakatnya dalam prosesnya. Dengan melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat, nantinya akan diketahui bagaimana kondisi masyarakat tersebut dan seperti apa pola pikir masyarakat.

Menurut Rahardjo Adisasmita, Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal (Rahardjo Adisasmita, 2006). Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan masyarakat.

Menurut Hoofsteede dalam Khairudin (1992), menyatakan bahwa partisipasi berarti ikut mengambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses (Khairudin H, 1992). Sementara menurut I Nyoman Sumaryadi, Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010).

Selain itu, menurut Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti (2011) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, diantaranya:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain, seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan Partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk mencapai hasil tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi ini berupa masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.2.2 Desa Wisata

2.2.2.1 Pengertian Desa Wisata

Menurut Chafid Fadeli (2009) menjabarkan desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa baik dari segi kehidupan social budaya, adat istiadat, aktivitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tatanan desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata misalnya atraksi, makanan dan minuman, cindramata, penginapan dan kebutuhan wisata lainnya.

Desa wisata adalah pengembangan suatu wilayah desa yang pada hakikatnya tidak merubah apa yang sudah ada tetapi lebih cenderung kepada penggalan potensi desa dengan memanfaatkan kemampuan unsur-unsur yang ada dalam desa (mewakili dan dioperasikan oleh penduduk desa) yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala kecil menjadi rangkaian aktivitas pariwisata, serta mampu menyediakan dan memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukungnya (M Muhammad, 2020)

Desa wisata merupakan pengembangan dari suatu desa yang memiliki potensi wisata dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti alat transportasi atau penginapan. Selain itu, alam dan lingkungan pedesaan yang masih asli dan terjaga menjadi salah satu faktor penting dari kawasan desa wisata. Melalui desa wisata, berbagai aktivitas keseharian masyarakat menjadi daya tarik bagi pengunjung, sehingga desa wisata tidak mengubah wajah desa, tetapi justru memperkuat kekhasan yang dimiliki oleh setiap desa, baik kekhasan budaya maupun alamnya (Zakaria, 2014)

Nuryanti (2016) mendefinisikan desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ditegaskan pula bahwa

komponen terpenting dalam desa wisata, adalah akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/ unit-unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan atraksi, yakni seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat. Beserta latar fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus tari, bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang spesifik.

2.2.2.2. Kriteria Desa Wisata

Kriteria Desa Wisata adalah Damayanti M (2018);

- 1 Memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas (sebagai atraksi wisata) baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun social budaya kemasyarakatan.
- 2 Memiliki dukungan dan kesiapan fasilitas pendukung kepariwisataan terkait dengan kegiatan wisata pedesaan.
- 3 Memiliki interaksi dengan pasar wisatawan yang tercermin dari kunjungan wisatawan.
- 4 Adanya dukungan inisiatif dari masyarakat setempat terhadap pengembangan desa tersebut terkait kepariwisataan

2.2.2.3. Pengembangan Desa Wisata

Menurun Arinda (2017) pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup

berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Unsur penggerak utama kegiatan desa wisata di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait.

Pengembangan desa wisata dalam pemberdayaan ini harus memperhatikan tiga hal yakni menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi dan daya tarik yang dimiliki, serta melindungi masyarakat (dalam persaingan yang sehat). Strategi yang dilakukan salah satunya melalui *community enterprises* yaitu meningkatkan dan memperluas kegiatan usaha berbasis komunitas. *Community enterprises* berperan antara lain:

1. Mengembangkan potensi dan kemampuan sesuai dengan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat sehingga dapat merangsang tumbuhnya kepercayaan, kemandirian, dan kerja sama.
2. Membantu mengembangkan teknologi lokal, sehingga dapat mengurangi ketergantungan teknologi.
3. Menciptakan wahana untuk latihan peningkatan ketrampilan sumber daya manusia dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan swadaya.
4. Menciptakan peluang kerja di wilayah pedesaan.
5. Memperkuat basis ekonomi pedesaan.
6. Mengurangi kesenjangan ekonomi antar desa

Soemarno (2014) mengemukakan bahwa untuk suksesnya pengembangan desa wisata perlu ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya serta di bidang-bidang kepariwisataan.

2. Kemitraan atau kerja sama dapat saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak pembina desa wisata dalam hal ini pihak dinas pariwisata daerah. Bidang-bidang usaha yang dikerjakasamakan antara lain seperti bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain.
3. Kegiatan pemerintahan di desa. Kegiatan dalam rangka desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain seperti rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata.
4. Promosi Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media.
5. Festival/pertandingan. Secara rutin diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi desa tersebut, misalnya mengadakan pertandingan, festival, dan lainlain.
6. Membina organisasi masyarakat. Penduduk desa yang biasanya merantau kemudian mudik atau tradisi lain dapat dibina dan diorganisir untuk memajukan desa wisata mereka.
7. Kerja sama dengan universitas. Kerja sama sebaiknya dilakukan dengan universitas atau perguruan tinggi yang melakukan pengembangan dan pengabdian supaya dilaksanakan di desa wisata. Hal ini guna membuka peluang dan masukan bagi kegiatan di desa wisata.

2.2.2.4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan hal yang penting ketika diletakkan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkan. Partisipasi yang hakiki akan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan tahapan pengembangan,

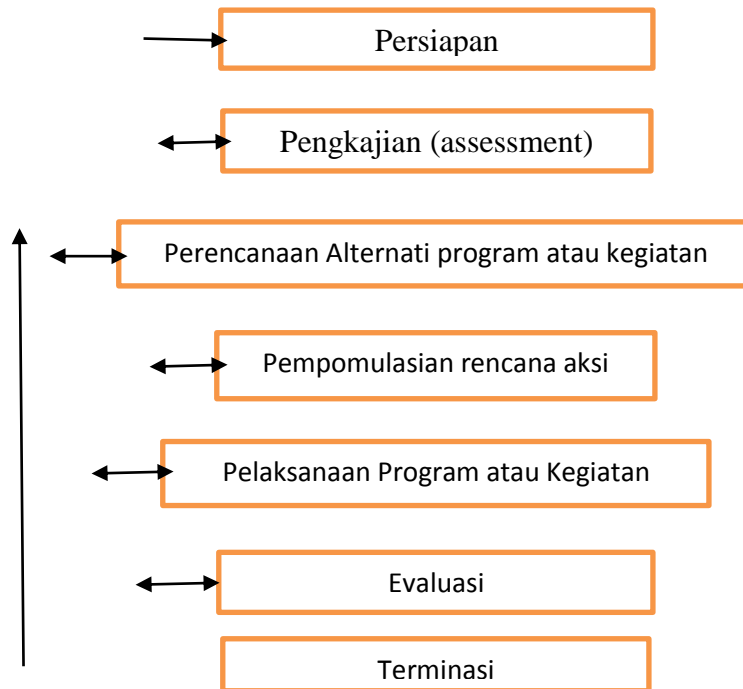
mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan program pengembangan desa wisata. Keikutsertaan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh kemauan, kesempatan, dan kemampuan dari masyarakat tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan desa wisata dapat mendorong mereka berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan oleh Sumarno (2014) tentang partisipasi masyarakat dalam keseluruhan:

1. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan Parameter yang digunakan untuk menentukan derajat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah keterlibatan dalam identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata.
2. Partisipasi masyarakat lokal dalam tahap implementasi Parameter Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi adalah keterlibatan di dalam pengelolaan usaha-usaha pariwisata, misalnya, sebagai pengelola penginapan, pengelola rumah makan, pemandu wisata, karyawan hotel, dan pengelola atraksi wisata. Keterlibatan masyarakat lokal dalam tahap implementasi dalam arti pemanfaatan peluang terlihat minim. Sekalipun wujud partisipasi itu ada, bentuknya lebih pada pengelolaan usaha berskala kecil.
3. Partisipasi masyarakat lokal dalam tahap pengawasan Masyarakat lokal memiliki peran kontrol yang sangat substansial dalam pengembangan desa wisata karena control terhadap proses pengambilan keputusan harus diberikan kepada mereka yang nantinya menanggung akibat pelaksanaan pengembangan termasuk kegagalan atau dampak negatif yang terjadi akibat pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, kewenangan pengambilan keputusan harus diberikan kepada masyarakat lokal. Parameter partisipasi

masyarakat dalam pengawasan adalah keterlibatan dalam tim pengawasan berikut kewenangan yang dimiliki.

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

2.2.2.4 Tahapan Pmberdayaan Mayarakat Sumber; Adi Isbandi Rukminto



2.2.3. Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR)

Dunia usaha saat ini berkembang sangat pesat, dan semakin terasa pengaruhnya terhadap roda perekonomian masyarakat. Mereka adalah yang belakangan paling diharapkan peranannya terutama karena mereka dianggap paling mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan taraf hidup banyak orang serta mendorong kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat luas (Wibisono 2007:95).

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat diikuti dengan berbagai peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan salah satunya adalah CSR (Tanggung jawab sosial) yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selama satu periode. Perkembangan CSR untuk konteks Indonesia (terutama yang berkaitan

dengan pelaksanaan CSR untuk kategori *discretionary responsibilities*) dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, pelaksanaan CSR memang merupakan praktik bisnis secara sukarela (*discretionary business practice*) artinya pelaksanaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kedua, pelaksanaan CSR bukan lagi merupakan *discretionary business practice*, melainkan pelaksanaannya sudah di atur oleh undang-undang (bersifat *mandatory*) (Solihin 2008:161).

Undang-undang perseroan terbatas yang ditetapkan oleh pemerintah memberikan gambaran bahwa adanya dukungan pemerintah dalam penerapan CSR. Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 74;

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
2. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada

umumnya. Hal ini dalam rangka mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat (Siti Kotijah: 2008) dalam (Prastowo dan Huda 2011:48).

2.2.3.1 Ciri-ciri Corporate Social Responsibility Berbasis Wisata

Setiap perusahaan dalam menjalankan operasinya memiliki rumusan-rumusan yang telah dirancang organisasi yang nantinya akan dilakukan untuk mencapai tujuannya atau dapat disebut sebagai manajemen strategi. Seperti yang dikatakan Abdurrahman (2009) bahwa langkah awal dari proses manajemen strategi adalah merumuskan visi, misi dan tujuan. Selain itu merumuskan tanggung jawab sosial dan moral dianggap sangat penting. Sebuah kegiatan yang dilakukan perusahaan dapat dikatakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), begitupun penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang basisnya di wisata, yang mana dalam hal ini perlu adanya pengembangan sektor wisata. Kata wisata berasal dari potongan kalimat yang mana istilah pariwisata belum dipahami banyak orang namun para ahli bahasa dan pariwisata Indonesia bahwa kata pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak atau berulang kali dan berkeliling sedangkan wisata berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi. Jadi, pariwisata berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi yang dilakukan secara berulang kali dan berkeliling.

Pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan pengertian kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Namun, dalam pengembangan wisata bergeser untuk lebih mementingkan ekonomi dari pada kepentingan lokal. Pentingnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) wisata melalui pemberdayaan

masyarakat lokal juga tidak terlepas dari tantangan terbesar yang harus dihadapi dalam pengembangan kepariwisataan Indonesia yaitu akan segera diberlakukannya globalisasi di segala sektor.

Untuk mencapai kekuatan dan mutu SDM wisata maka diperlukan modal. Modal ini dapat berasal dari pemerintah maupun swasta. Dalam situasi di mana pemerintah terpaksa harus bekerja dengan sumber daya yang amat terbatas, sangatlah diharapkan pihak swasta dapat berperan lebih besar dengan ikut mendanai pembangunan wisata. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah pendanaan oleh pihak swasta sebagai wujud kepedulian dan kesukarelaan sehingga tidak ada unsur memperoleh keuntungan dari proses pemberdayaan masyarakat. Kepedulian dan kesukarelaan dari pihak swasta seperti ini dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR).

2.2.3.2 Strategi CSR Dengan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut *Princes Of Wales Foundation* (2001) ada lima hal penting yang dapat menjadi strategi CSR dengan pemberdayaan masyarakat yang bisa diterapkan di dalam implementasi program CSR suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut;

1. Menyangkut *Human Capital* atau pemberdayaan manusia.
CSR dengan pemberdayaan masyarakat baru melibatkan individu-individu dalam kegiatannya. Masyarakat harus diajak untuk berpartisipasi aktif dalam implementasi program.
2. *Enirwoments* yang berbicara tentang lingkungan.
Perusahaan mengembangkan tanggung jawab sosialnya dalam bidang lingkungan, terutama lingkungan masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dari operasional perusahaan, hal tersebut juga akan menguntungkan kegiatan

produksi perusahaan, karena masyarakat akan bersikap bagi perusahaan ikut berpartisipasi merawat lingkungan mereka.

3. *Good Corporate Governance.*

Penerapan *Good Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) akan menciptakan efektifitas dalam kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan mendukung pelaksanaan CSR yang baik pula, karena dihasilkan dari pengelolaan yang baik.

4. *Social Cohesion.*

Pelaksanaan CSR harus mengutamakan keadilan dan jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial, akibat ada dari pihak lain yang merasa dirugikan.

5. *Economic Strength*

Atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian.

CSR dengan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk memandirikan masyarakat. Strategi-strategi tersebut diterapkan dalam implementasi program CSR suatu perusahaan. Strategi diatas bisa menjadi alat agar program CSR berjalan dengan baik.

2.2.4 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari lainnya, tetapi lebih tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangannya adalah keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Kesejahteraan sosial merupakan ilmu terapan, ilmu yang saling meminjam dari disiplin ilmu lain, seperti psikologi, antropologi, hukum, ekonomi dan disiplin ilmu lainnya. Kesejahteraan sosial memiliki tiga kerangka nilai, meliputi *Body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *Body of value*

(kerangka nilai) dan *Body of skills* (kerangka keterampilan). Definisi Kesejahteraan Sosial menurut Suharto (2010:3) adalah sebagai berikut;

1. Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu.
2. Definisi tersebut menggambarkan kesejahteraan sosial adalah suatu lembaga sosial yang beraktifitas atau yang berperan penting dalam mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusinya dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh setiap individu, kelompok, maupun masyarakat. Adapun definisi kesejahteraan sosial yang lain menurut Suharto (2009: 154) adalah sebagai berikut;
 - a. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Berdasarkan definisi tersebut maka kesejahteraan sosial merupakan keadaan untuk memenuhi semua kebutuhan dari mulai material dan spiritual sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dan layak tanpa adanya halangan apapun. Fungsi sosialnya tersebut dapat juga berupa sosialisasinya serta mobilitas dalam kesehariannya.

2.2.4.1 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk dapat mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan mengurangi tekanan dan goncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua

program kesejahteraan sosial menurut Schneiderman dalam Fahrudin (2012:10) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

2.2.4.2 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat, juga memiliki fungsi-fungsi yang berkaitan erat terhadap keberfungsian sosial dalam kehidupan. Selain itu kesejahteraan sosial juga memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan penyesuaian sosial dan relasi sosial sehingga diharapkan peranan-peranan sosial yang terganggu dapat kembali sesuai dengan apa yang diinginkan dan keberfungsian sosial masyarakat dapat kembali normal.

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander dan Apte, (1982) dalam Fahrudin, (2012: 12) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (*preventive*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.
2. Fungsi penyembuhan (*curative*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.
3. Fungsi Pengembangan (*development*) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak

langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*supportive*) Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial ini dapat di terapkan dalam praktik pekerja sosial profesional dan dalam pemecahan masalah penyandang disabilitas yang tidak dapat terlaksana kemandiriannya, upaya untuk memenuhi kemandirian penyandang disabilitas pihak lembaga yang terkait perlu untuk terlibat dalam memecahkan masalah tersebut.

2.3 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini dibahas mengenai implementasi alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. PLN (Persero) UID Banten terhadap pemberdayaan masyarakat. Definisi mengenai Corporate Social Responsibility telah diungkapkan oleh World Bank Lembaga keuangan global ini merumuskan CSR sebagai “*the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*”.

Definisi ini menekankan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan kemanfaatan CSR bagi usaha pembangunan (Azheri, 2011).

Pada umumnya ada empat pola penerapan CSR yang diterapkan di Indonesia. Pertama, keterlibatan langsung dimana perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Kedua,

melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, dimana perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Ketiga, bermitra dengan pihak lain, yaitu perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Keempat, mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium, dimana perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan social (Suharto, 2007).

Pemberdayaan (*empowerment*) diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan (Harahap, 1999). Pemberdayaan pada dasarnya merupakan kegiatan terencana dan kolektif dalam memperbaiki kehidupan masyarakat yang dilakukan melalui program peningkatan kapasitas orang, terutama kelompok lemah atau kurang beruntung agar mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, mengemukakan gagasan, melakukan pilihan-pilihan hidup, melaksanakan kegiatan ekonomi, menjangkau dan memobilisasi sumber, berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Selanjutnya, melalui program-program pelatihan, pemberian modal usaha, perluasan akses terhadap pelayanan sosial, dan peningkatan kemandirian, proses pemberdayaan diarahkan agar kelompok lemah memiliki kemampuan atau keberdayaan. Keberdayaan di sini bukan saja dalam arti fisik dan ekonomi, melainkan pula dalam arti psikologis dan social (Suharto, 2007)

Tahap Implementasi program merupakan tahap yang paling penting dalam proses pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan rencana dapat berjalan dengan lancar, maka hal-hal yang mungkin menyebabkan terjadi pertentangan baik antara pengelola program dengan warga maupun pertentangan diantara warga supaya dapat dihindari (Suharto, 2007)

Dalam konteks ini, bagi program pemberdayaan masyarakat, bahwa bantuan atau pendampingan dari luar harus diposisikan hanya stimulan

belaka dan tidak selamanya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang diintervensi melalui sebuah program tersebut tidak mengalami ketergantungan. Tentu saja hal tersebut dapat berdampak buruk bagi mereka, dan bertentangan dengan tujuan sebenarnya diselenggarakannya program pemberdayaan masyarakat yakni masyarakat dapat berdaya dan menolong diri sendiri dalam menghadapi

hambatan dan kendala yang dihadapinya (Suharto, 2007)

Kerangka berpikir atau kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

2.3 kerangka berfikir

